

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap daerah memiliki potensi untuk mengalami kemajuan daerahnya sendiri. Namun kemajuan tersebut harus didukung juga dengan adanya inovasi yang dibangun. Inovasi bisa muncul dari mana saja, inovasi bisa diukur melalui 2 kelompok yang berhubungan dengan output maupun dengan input (Hermana, 2009). Menurut Fontana dalam (Maulana, 2018) menyebutkan bahwa inovasi bisa dianggap penting karena bisa menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna dan juga harga yang di tawarkan pada konsumen atau pengguna. Inovasi dalam organisasi pemerintahan dapat mendorong pemerintah untuk berfikir cara inovatif dan juga kreatif dalam menerapkan sebuah pelayanan.

Ditengah banyaknya permasalahan secara global seperti kemiskinan, bencana alam, perubahan iklim, krisis keuangan, isu pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada integrasi pembangunan ekonomi serta perlindungan lingkungan tersebut merupakan tantangan yang berat juga bagi para pengambil kebijakan disetiap negara (Suhardjana, 2006). Di Indonesia ini sangatlah penting untuk menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, baik itu ditingkat Kota ataupun tingkat Desa. Dikatakan sangat penting karena pembangunan berkelanjutan itu akan membantu memajukan suatu daerah dengan cara memperhatikan segala aspeknya, mulai dari aspek ekonominya, sosialnya, dan juga lingkungannya (Suhardjana, 2009).

WCED (*The World Commission on Environment and Development*) menjelaskan pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dimasa kini tanpa mengabaikan keperluan hidup dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam *laporan Brundtland* juga telah dijelaskan bahwa adanya keharusan disetiap negara untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan termasuk juga di Indonesia (Suhardjana, 2006). Di Indonesia sendiri, pembangunan yang dilakukan itu seharusnya dimulai pada tingkatan terkecil terlebih dahulu, yakni ditingkat desa setelahnya ditingkat kota. Karena keberhasilan pembangunan di suatu desa sebenarnya sangat berpengaruh terhadap pembangunan yang ada di kota.

Pembangunan desa yang dimaksud disini adalah pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dan juga memberdayakan masyarakat yang ada di desa. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa yang dimaksud adalah bagaimana masyarakat desa tersebut dapat melakukan pembangunan desa dengan inisiatif serta prakarsa yang di bangun bersama pemerintah desa dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa, dengan cara memanfaatkan sumber daya alam dan pengetahuan yang dimiliki (Murbeng dkk, 2016). Selain itu pembangunan yang bisa dilakukan dalam tingkatan desa yakni dengan cara memberdayakan masyarakat serta mengembangkan perekonomian masyarakat desa. Pembangunan ini bisa juga akan sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara memunculkan potensi ekonomi yang berbasis masyarakat dengan begitu akan membangun serta membangkitkan partisipasi dari masyarakat desa itu sendiri (Atmojo dkk , 2017).

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam suatu pemerintahan, baik itu pemerintahan tingkat Desa, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, ataupun di tingkat pusat. Kesejahteraan masyarakat tersebut harus seimbang antara aspek ekonomi, aspek sosialnya, aspek pendidikannya, kesehatannya, lingkungannya, dan aspek-aspek yang lainnya. Jika salah satu aspek tersebut tidak dapat dipenuhi secara baik oleh suatu pemerintahan maka tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dikatakan berkurang karena adanya ketidak seimbangan antara aspek yang satu dengan aspek-aspek yang lainnya (Wahyuni, 2014).

Seperti yang telah dijelaskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia telah mencatat jumlah penduduk yang miskin di Indonesia mulai bulan Maret tahun 2018 yakni ada sebanyak 25,95 juta orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 633,2 ribu orang dari yang sebelumnya tercatat sebanyak 26,58 juta orang pada bulan September 2017 (Tirto.id, 2018). Menurut Kepala BPS Suhariyanto persentase kemiskinan pada bulan Maret 2018 tercatat sebesar 9,82% dan ini pertama kalinya Indonesia memiliki tingkat kemiskinan satu digit.

Sementara itu, persentase pada bulan September 2017 itu tercatat 10,12%. Capaian tersebut merupakan capaian terendah sejak tahun 1998. Sejumlah faktor dalam kurun waktu antara bulan September 2017-bulan Maret 2018 pun dapat dikatakan hal tersebut berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Indonesia (Tirto.id, 2018). BPS juga menemukan bahwa perbedaan yang drastis kemiskinan antara masyarakat di perkotaan dan masyarakat di pedesaan masih dalam angka yang cukup tinggi.

Pada Bulan Maret 2018, persentase penduduk miskin di kota tercatat 7,02%, sementara persentase penduduk miskin di desa tercatat 13,20% dan hal tersebut besarnya hampir dua kali lipat dari penduduk miskin yang ada di kota (Tirto.id, 2018). Dengan begitu semakin meningkatnya angka kemiskinan maka akan berdampak pula pada aspek yang lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika aspek kemiskinan tersebut meningkat maka akan berpengaruh terhadap aspek pendidikan, ekonomi, kriminalitas, pengangguran, aspek sosial, dan aspek-aspek yang lainnya (Murbeng dkk, 2016).

Disetiap daerah harus memiliki kemajuan termasuk ditingkatan desa, terlebih desa yang sangat memanfaatkan potensi dari masyarakatnya. Maka dari itu suatu desa dapat maju apabila memiliki inovasi-inovasi yang baru untuk dapat mengembangkan desanya tersebut. Inovasi itu bisa muncul dari mana saja, bisa dari masyarakat desa ataupun dari pemerintah desa. Inovasi yang dimaksud yakni terobosan untuk dapat memajukan suatu desa yang terobosannya tersebut berupa program pelaksanaan ataupun berupa kegiatan-kegiatan yang akan atau sudah dilakukan disuatu desa.

Seperti yang dijelaskan dalam KepmenDesa PDTT (Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia) no 48 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bahwa kewenangan desa sudah diperluas dengan cara meningkatkan keuangan desa melalui *transfer* Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal tersebut dilakukan pemerintah agar kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat (KepmenDesa PDTT No 48

tahun 2018). Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat KemenDes PDTT ini sangat pro aktif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di desa, seperti kurangnya ketersediaan pelayanan, jaringan, lemahnya pengelolaan pembangunan desa dan masalah-masalah lain yang ada di desa dengan cara meluncurkan program PID (Program Inovasi Desa).

PID ini bertujuan untuk mendorong pemerintah desa dalam melakukan pembangunan di desanya seperti melalui BumDes (Badan Usaha Milik Desa), meningkatkan kualitas SDA (sumber Daya Alam) di desanya, dan juga meningkatkan pemenuhan infrastruktur desanya (KepmenDesa PDTT No 48 tahun 2018). Seperti beberapa desa yang ada di Kabupaten Bantul juga sudah menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan dengan melalui pemberdayaan masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa serta mengurangi tingkat kemiskinan yang ada disuatu desa.

Berdasarkan data kemiskinan dari Peraturan Bupati Kabupaten Bantul No 103 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 menjelaskan bahwasannya di Kabupaten Bantul yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 75 Desa ini tingkat kemiskinannya masih dapat dikatakan cukup tinggi, berikut tabelnya :

Tabel 1.1**Tabel kemiskinan di Kabupaten Bantul tahun 2016.**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk Miskin
1	Srandakan	8	6.390 ribu (63,9%)
2	Sanden	4	6.519 ribu (65,19%)
3	Kretek	5	4.417 ribu (44,17%)
4	Pundong	3	6.627 ribu (66,27%)
5	Bambang Lipuro	4	9.170 ribu (91,7%)
6	Pandak	8	14.929 ribu (149,29%)
7	Pajangan	5	12.425 ribu (124,25%)
8	Bantul	4	7.534 ribu (75,34%)
9	Jetis	2	9.526 ribu (95,26%)
10	Imogiri	4	13.459 ribu (134,59%)
11	Dlingo	3	8.703 ribu (87,03%)
12	Banguntapan	3	11.273 ribu (112,73%)
13	Pleret	4	7.806 ribu (78,06%)
14	Piyungan	3	7.195 ribu (71,95%)
15	Sewon	5	12.377 ribu (123,77%)
16	Kasih	3	13.595 ribu (135,95%)
17	Sedayu	6	9.836 ribu (98,36%)

Sumber: Lampiran I Peraturan Bupati Kabupaten Bantul No 103 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.

Berbeda dengan Desa Dlingo yang mana di Desa Dlingo ini terdapat Badan Usaha Milik Desa bernama BUMDesa Giritama Dlingo dan didirikan setelah diterbitkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Berdirinya Badan Usaha ini dilakukan pada tanggal 26 November 2016 melalui Peraturan Desa Dlingo no 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang kemudian dalam pengembangannya dikemas dengan konsep Desa Mart. BUMDes Giritama ini sangat berperan aktif untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta memajukan desanya agar tidak lagi termasuk kedalam salah satu desa termiskin di Kabupaten Bantul. Karena sebelumnya, Desa Dlingo termasuk ke dalam salah satu Kecamatan yang tertinggal dan terpinggirkan di Kabupaten Bantul seperti yang telah disajikan dalam tabel diatas.

Namun Desa Dlingo berinisiatif untuk dapat memajukan Desanya dengan cara menata program-program untuk mengatasi sebuah ketertinggalannya tersebut melalui mendirikan minimarket modern (Desa Mart) yang dikelola secara profesional dan juga transparan oleh Pemerintah Desa Dlingo (www.CNNIndonesia.com, 2018). Desa Mart disini merupakan toko swalayan yang menjual produk-produk lokal dari Desa Dlingo. Pemerintah Desa Dlingo sangat memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat. Selain itu Sumber Daya Manusianya (SDM) yang ada di Desa Dlingo juga sangat dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Dlingo (www.CNNIndonesia.com, 2018). Desa Mart yang ada di Desa Dlingo tersebut merupakan suatu konsep yang diharapkan mampu untuk menjadi solusi bagi para pelaku pasar tradisional dalam menghadapi persaingan dengan pasar modern dan toko berjejaring.

Konsep Desa Mart juga adalah konsep yang mempertemukan produsen dari desa dengan konsumen yang dari luar desa dengan menawarkan produk-produk yang juga memiliki daya saing yang cukup kuat terutama dari segi kualitasnya, kuantitasnya, dan juga harganya (www.TribunJogja.com, 2017). Desa mart Desa Dlingo baru didirikan sekitar 2 tahun lalu, yakni tanggal 26 November 2016 dengan menggunakan anggaran desa Dlingo sebesar Rp. 200 juta. Lokasi Desa Martnya tersebut berada di Balai Desa Dlingo, dan lokasinya tersebut juga sangat strategis untuk di jangkau oleh masyarakat Desa Dlingo maupun masyarakat luar Dlingo (www.TribunJogja.com, 2017).

Alasan BUMDes Giritama menjual juga bahan-bahan pokok masyarakat di Desa Mart tersebut untuk mempermudah serta membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, karena jarak antara Desa Dlingo dengan pusat perbelanjaan juga cukup jauh dan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga Pemerintah Desa berinisiatif untuk menjual juga produk lokal di Desa Mart agar dapat dijangkau oleh masyarakat Dlingo. Selain itu, dengan didirikannya Desa Mart tersebut bertujuan untuk dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di Desa Dlingo dan juga agar merubah persepsi masyarakat bahwa pemerintah di Desa Dlingo tersebut peduli terhadap masyarakat juga dan tidak hanya mengurus tentang urusan administratif saja (www.TribunJogja.com, 2017).

Desa Mart tersebut sudah mulai beroperasi pada tanggal 20 Desember 2016. Desa Mart Dlingo juga memiliki *tagline* bukan untuk belanja saja, namun untuk mempromosikan juga produk-produk lokal yang telah diciptakan oleh masyarakat Dlingo. Desa Mart Dlingo memiliki misi untuk dapat membina warung-warung yang ada di Desa Dlingo. Selain untuk melatih kegiatan dalam bidang *marketing*.

Karena konsep Desa Mart ini baru bejalan sekitar 2 tahun maka dari itu belum bisa memberikan keuntungan yang signifikan. Namun dengan adanya inovasi Desa Mart ini Badan Usaha Giritama sudah menargetkan agar ditahun 2018 bisa menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp. 15 juta (www.Balilatfo.kemendesa.go.id). Maka dari itu, dengan adanya Desa Mart ini Pemerintah Desa Dlingo mengharapkan masyarakatnya mampu untuk turut berpartisipasi serta berkembang dalam memajukan Desa Dlingo yang pada

sebelumnya Desa Dlingo ini termasuk kedalam salah satu desa yang tertinggal jika dibandingkan dengan desa-desa di Kabupaten lain.

Dari latar belakang di atas, maka menarik bahwa penelitian ini merujuk membahas tentang bagaimana inovasi pemerintah Desa Dlingo dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui desa mart tersebut. Karena sebelumnya Desa Dlingo adalah desa yang tertinggal namun dengan adanya inovasi yang muncul dari Pemerintah Desa Dlingo melalui BUMDes untuk membangun Desa Mart, sehingga Desa Dlingo mengalami kemajuan yang cukup bagus dan menarik untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dlingo tersebut mungkin dapat memotivasi pemerintah Desa yang lain untuk dapat mewujudkan Desanya tersebut menjadi Desa yang mandiri.

Maka dari itu peneliti rumuskan dengan rumusan masalah penelitiannya adalah : **Bagaimana inovasi yang dilakukan oleh BUMDes Giritama Desa Dlingo dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui Desa Mart pada tahun 2017?**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain, agar masyarakat dapat mengetahui inovasi apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Dlingo untuk dapat mewujudkan kesejahteraan serta memajukan desanya tersebut dan menjadi salah satu contoh bagi Pemerintahan di daerah lain.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

1. Untuk memahami makna inovasi pemerintah dalam mewujudkan desa mart mandiri melalui BUMDES Giritama.
2. Untuk memahami kajian inovasi pemerintah dalam mewujudkan desa mart mandiri melalui BUMDES Giritama.
3. Untuk dijadikan acuan pengetahuan bagi peneliti-peneliti di masa yang akan datang.
4. Sebagai bahan studi pada program studi Ilmu Pemerintahan khususnya dibidang inovasi pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat Bantul agar bisa memandang bahwa perkembangan desa tersebut sangatlah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat lainnya juga yang ada di tingkat Kabupaten/Kota ataupun Provinsi.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini di harapkan bisa menjadi acuan pengetahuan bagi peneliti-peneliti di masa yang akan datang.

3. Bagi Masyarakat atau Pembaca

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat Bantuk khususnya dengan adanya pemberdayaan masyarakat maka hal tersebut berpengaruh kepada proses pembangunan di suatu desa.

E. Tinjauan Pustaka

Tabel 1.3
Penelitian terdahulu

NO	JUDUL JURNAL/SKRIPSI	NAMA PENGARANG	TAHUN TERBIT	POKOK HASIL/TEMUAN JURNAL ATAU SKRIPSI
1	Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)/ Jurnal Ilmu Administrasi Publik.	Siaga Basu Murbeng, Mochamad Saleh Soeaidy, Riyanto	2016	Di Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung Pemerintah Desanya menerima bantuan dari PNPM Mandiri yang mana berupa dana untuk melakukan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik. Setelah adanya pelaksanaan PNPM Mandiri tersebut, Desa Bendungan sudah menghasilkan beberapa perkembangan mulai dari infrastruktur dan juga pembangunan yang lain.
2	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan di Desa Gilangharjo Pandak Kabupaten (Studi kasus Lembaga Community Development Yayasan Suara Bhakti). /Tesis	Mohammad Sofiandi	2015	Desa Gilangharjo memiliki program pemberdayaan masyarakat yani program CTC (Community Training Center) yang mana program tersebut bertujuan untuk meningkatkan lingkungan masyarakat dan kesehatannya. Karena kebanyakan dari masyarakat Desa Gilangharjo memiliki hewan ternak yakni sapi. Maka dari itu masyarakatnya berinisitaif untuk mengolah kotoran hewan ternaknya

				menjadi berupa pupuk ataupun gas yang bisa di manfaatkan kembali oleh masyarakat itu sendiri atau bisa menambah pendapatan masyarakat.
3	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. / Jurnal	Made Heny Urmila Dewi, Chafid Fandeli, M. Baiquni.	2013	Desa Jatiluwih Tabanan, Bali adalah desa wisata warisan budaya, namun beberapa tahun sebelumnya kemajuan desa Jatiluwih Tabanan tersebut adalah penyebab dari banyaknya investor-investor yang masuk ke Desa tersebut dan partisipasi masyarakat tidak di libatkan sama sekali. Hingga akhirnya, masyarakat memiliki inovasi ingin berpartisipasi untuk lebih memajukan desanya tersebut dengan cara membangun CBT (<i>Community Based Tourism</i>) yang mana pembangunan di desa tersebut akan di iringi dengan pasrtisipasi masyarakat dan juga kegiatan pariwisatanya di lakukan sepenuhnya oleh masyarakat Jatiluwih, sehingga Desa Jatiluwih berkembang bukan lagi penyebab dari datangnya investor yang datang ke Desa Jatiluwih melainkan adanya keterlibatan dari masyarakat Desa Jatiluwih itu juga.
4	Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi	Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani,	2017	Dana Desa yang telah di berikan kepada desa Bangunjiwo di gunakan dengan

	berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo. / Jurnal	Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama		baik oleh Pemerintah Desa dengan tujuan pembangunan di Desa Bangunjiwo semakin meningkat. Hal tersebut di buktikan dengan adanya penurunan angka pengangguran dan juga kenaikan angka masyarakat prasejahtera. Pemerintah menggunakan dana desa dengan efektif sehingga angka kemiskinan di desa Bangunjiwo juga berkurang. Pemerintah Desa Bangunjiwo memajukan desanya yakni dengan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat serta melakukan pelatihan agar masyarakat dapat berkembang dengan potensinya tersebut.
5	Efektivitas Pemberdayaan Usah Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kerupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. / Jurnal	Bachtiar Rifa'i	2013	Pemerintah menggunakan program labsite pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kedung Rejo. Program tersebut membantu masyarakat Desa Kedung Rejo dalam meningkatkan perekonomiannya yang mana sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Kedung Rejo adalah pengolah kerupuk ikan. Kendala sebelum adanya bantuan program labsite dari pemerintah yakni kurangnya modal bagi masyarakat musiman pengolah kerupuk ikan ini, di

				<p>timbah lagi dengan lemahnya keterampilan masyarakat. Maka dari itu pemerintah memilih untuk memberikan bantuan program labsite tersebut di Desa Kedung Rejo dengan tujuan menurunkan kemiskinan dan juga angka pengangguran yang ada di Desa Kedung Rejo yang mana masyarakat disana hanya berpotensi sebagai pengolah kerupuk ikan musiman saja.</p>
6	<p>Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan di Kabupaten Malinau./ Jurnal</p>	Iyan	2015	<p>Pelaksanaan PNPM dii Desa Long Ampung belum terlaksana dengan baik bahkan belum sesuai karena memiliki beberapa kendala. Kendala yang paling utama yakni kendala keuangan. PNPM dalam hasil rapat Musrenbangnya tidak mampu menampung berbagai permasalahan yang ada di Desa Long Ampung terlebih misi utamanya yakni mengetaskan kemiskinan, namun berhubung banyaknya kebutuhan serta kendala keuangan yang di alami oleh PNPM mengakibatkan programnya tersebut belum terlaksana dengan baik.</p>
7	<p>Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Uoaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah</p>	Ayu Purnami Wulandari	2014	<p>Pemberdayaan masyarakat yang di dukung oleh Pemerintah Desa Kajongan berjalan dengan lancar dan mengalami peningkatan yang drastis. Hal tersebut</p>

	di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga./ Skripsi UNY			karena adanya dukungan dari beberapa pihak seperti Pemerintah Desanya, lembaga, bahkan serta antusias dari masyarakat Desa Kajongan itu sendiri sangat tinggi untuk dapat memajukan kesejahteraannya. Namun dalam peningkatan kesejahteraannya terdapat juga kendala. Kendala yang di hadapi tersebut seperti kurangnya modal karena target yang di capai semakin tinggi untuk membuat sapu dalam setiap harinya, selain itu fasilitasnya tidak cukup masih kurang, dan juga faktor cuaca. Tidak di pungkiri keberhasilan ini juga berkat dari tersedianya Sumber Daya Alam yang ada di Desa Kajongan.
8	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali)./ Jurnal	Anak Agung Istri Andriyani, Edhi Martono, Muhamad.	2017	Masyarakat Desa Wisata Penglipuran Bali sudah mengembangkan desanya dengan begitu baik melalui pemberdayaan masyarakatnya. Kegiatan yang di lakukannya pun mulai dari perbaikan infrastruktur, sarana dan prasarana, kebersihan, promosi desa wisata, antusias masyarakat desa dalam meningkatkan pengembangan desa, melakukan pelatihan budayanya, melestarikan pohon bambu sebagai salah satu destinasi tempat wisatanya tersebut

				meningkatkan perekonomian di Desa Penglipuran Bali. Potensi masyarakat juga sumber daya yang ada sangat memadai untuk meningkatkan pariwisatanya. Masyarakat Desa Penglipur juga tidak sedikit yang beralih profesi sebagai penjual makanan atau minuman, namun walaupun begitu tidak merubah atau menurunkan pendapatan masyarakat yang ada di Desa Penglipur Bali.
9	Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Media. / Jurnal	Andi Haris	2014	Untuk dapat melakukan pemberdayaan masyarakat, di perlukannya kajian terlebih dahulu tentang pendekatan apa yang cocok bagi masyarakat tersebut agar sesuai dengan kebutuhannya. Pendekatan dalam pemberdayaan ada 6 yaitu pendekatan makro, pendekatan mikro, pendekatan mezzo, pendekatan kesejahteraan, pendekatan pembangunan, pendekatan pemberdayaan. Hal tersebut perlu untuk di kaji agar masyarakat tersebut dapat sesuai dengan strategi yang ingin di capai dan dapat memahami setiap inovasi yang masuk dan akan di kembangkan dalam masyarakat.
10	Inovasi Daerah Dalam Pembangunan	Rahmad Purwanto W,	2017	Desa Maoslor tersebut memiliki potensi

	Desa Berbasis Potensi Desa (Kajian Pengembangan Desa Inovasi Maoslor, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap)./ Jurnal	Christine Wahyuningsih. Diah	yakni pertanian dan juga perikanan. Desa Maoslor juga merupakan desa unggulan karena dapat mengembangkan potensi unggulannya tersebut. dalam mengembangkan Desa Maoslor juga saling bekerja sama antara lembaga, masyarakat, Pemerintah Desanya, dan pemangku kepentingan lainnya. Karena dalam memajukan serta mensejahterakan suatu desa di perlukan usaha yang maksimal dan juga kerja sama yang kuat antar sesama <i>stakeholder</i> . Potensi unggul desanya tersebut terus di kembangkan seperti perikanan yang hanya 1 macam saja yakni peternakan gurameh di kembangkan menjadi lebih luas lagi seperti peternakan lele dan juga nila. Dalam hal pertanian dan perkebunan juga di olah menjadi kuliner. Yang mengembangkan inovasi desa melalui potensi desa juga tidak hanya Pemerintah Desa yang memiliki peran pentingnya, namun peran pemuda juga sangat penting karena pemuda adalah pihak utama yang dapat menjalankan inovasinya serta memiliki pengaruh yang penting dalam inovasi desa potensi unggul tersebut.
--	---	------------------------------	--

Jadi, perbedaan yang sangat menonjol antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah cara dari Pemerintah Desa Dlingo dalam memberdayakan masyarakatnya. Hampir seluruh dari penelitian terdahulu menjelaskan bahwa Pemerintah Desa lain dalam memberdayakan masyarakatnya hanya melalui satu inovasi dan juga satu strategi (menyediakan 1 jenis pelatihan saja) . Pemerintah Desa Dlingo juga sama seperti Pemerintah Desa lain yang hanya memiliki satu inovasi.

Namun yang membedakan Pemerintah Desa lain dengan Pemerintah Desa Dlingo disini adalah strategi yang digunakan Pemerintah Desa Dlingo tidak hanya satu strategi saja, melainkan menggunakan beberapa strategi seperti pelatihannya saja terbagi menjadi beberapa kelompok yakni, pelatihan pembuatan makanan ringan, pelatihan pengemasan, pelatihan dalam marketing, pelatihan dalam membuat kerajinan dari kayu atau baju serta memanfaatkan hasil bumi masyarakat desanya untuk dijual kembali pada masyarakat lain. Pemerintah Desa Dlingo memberdayakan masyarakat karena adanya inovasi dari mantan Kepala Desa periode 2012-2018 yakni Bachrudin untuk dapat mendirikan Desa Mart yang mana fasilitas tersebut di sediakan untuk menjual produk-produk hasil dari masyarakat Desa Dlingo itu sendiri dan dapat di nikmati oleh masyarakat lokal maupun luar.

F. Kerangka Dasar Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu tentang, teori inovasi, teori pemberdayaan masyarakat, dan teori BumDes menurut beberapa ahli.

1. Teori Inovasi

Teori inovasi merupakan sebuah konsep yang baru, baik itu berupa ide, barang, proses, ataupun jasa. Inovasi dapat di ukur melalui 2 kelompok, yakni ukuran yang berhubungan dengan output dan ukuran yang berhubungan dengan input (Hermana, 2004). Yang di berhubungan dengan output, yakni :

1. Proses atau produk yang baru atau sedang di kembangkan
2. Persentase dari penjualn produk baru tersebut
3. Kekayaan intelektual yang di hasilkan (paten)
4. Kinerja sebuah perusahaan

Sedangkan ukuran inovasi yang berhubungan dengan input, yakni :

1. Investasi di bidang penelitian dan juga pengembangan
2. Kekayaan intelektual
3. Biasa akuisi teknologi yang baru
4. Biaya produksi pertama produk yang baru
5. Aset yang tidak berwujud contohnya seperti *goowill*
6. Biaya pemasaran dan juga pelatihan untuk produk yang baru
7. Perubahan organisasi dan juga metode manajerial

Menurut Martin Radenakers yang di kutip oleh (Hermana, 2004) dalam jurnalnya tentang Mendorong Daya Saing di Era Informasi dan Globalisasi: Pemanfaatan Modal Intelektual dan Teknologi Informasi sebagai Basis Inovasi di Perusahaan, membagi inovasi tersebut ke dalam empat tipe, yakni :

1. Inovasi Produk

Yaitu produk, jasa, atau kombinasi dari keduanya yang menjadikan keduanya menjadi produk atau jasa yang baru.

2. Inovasi Proses

Yakni metode atau cara yang baru dalam menjalankan suatu kegiatan yang bernilai tambah contohnya seperti, distribusi atau produksi yang lebih baik atau lebih murah.

3. Inovasi Organisasional

Yaitu metode yang baru dalam mengelola, mengkoordinasi, dan mengawasi pegawai, kegiatan, dan juga tanggung jawabnya.

4. Inovasi Bisnis

Yaitu kombinasi dari produk, proses, dan juga sistem organisasional yang baru. Tipe ini dikenal juga sebagai model bisnis.

Desa yang inovasi adalah desa yang sudah mampu mengembangkan unggulan lokal dan juga mampu menangani permasalahan pembangunan desa yang berbasis Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan desa inovasi dapat di bagi kedalam lima aspek strategis, yakni (Purwanto W, 2017) :

1. Potensi dan juga unggulan desa itu sendiri
2. Pertanian yang terpadu
3. Pengembangan sumberdaya manusia dan administrasi desa
4. Pengembangan wisata desa
5. Kewirausahaan dan ekonomi desa yang kreatif.

Menurut Fontana dalam (Maulana, 2018) menyebutkan bahwa inovasi merupakan sebuah kesuksesan ekonomi dan juga sosial berkat di perkenalkannya cara baru dari cara lama dalam mentransformasikan input menjadi output yang dapat menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna dan juga harga yang di tawarkan pada konsumen atau pengguna. Inovasi dalam organisasi pemerintahan dapat mendorong pemerintah untuk berfikir cara inovatif dan juga kreatif dalam menerapkan sebuah pelayanan.

Menurut Rogers dalam (Maulana, 2018) menyebutkan bahwa inovasi itu memiliki atribut yang terbagi ke dalam 5 bagian, yakni :

1. Keuntungan relatif

Maksudnya, sebuah inovasi tersebut harus memiliki keunggulan dan nilai yang lebih jika di bandingkan dengan inovasi-inovasi sebelumnya.

2. Kesesuaian

Maksudnya, dalam sebuah inovasi itu harus memiliki sifat yang sesuai dengan inovasi yang di gantikannya. Hal ini bermaksud agar inovasi yang lama tidak serta di buang begitu saja. Selain karena adanya faktor

biaya yang sedikit, namun inovasi yang lama juga masih menjadi bagian dari inovasi yang baru.

3. Kerumitan

Dengan sifat inovasi tersebut baru, maka inovasi akan mempunyai tingkat kerumitan yang dapat di katakan lebih tinggi dari inovasi sebelumnya. Namun karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan tersebut pada umumnya tidak menjadi masalah yang penting lagi.

4. Kemungkinan untuk di coba

Inovasi ini hanya bisa di terima apabila telah teruji dan juga terbukti memiliki keuntungan jika di bandingkan dengan inovasi yang lama.

5. Kemudahan dalam di amati

Sebuah inovasi baru harus dapat di amati, mulai dari segi bagaimana inovasi tersebut bekerja dan juga menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi.

Proses Inovasi menurut Rogers dalam (Maulana, 2018), menyebutkan teori difusi inovasi, dalam teori tersebut juga terbagi ke dalam lima tahapan inovasi, yakni :

1. Pengetahuan

Dalam tahapan ini, seseorang belum memiliki informasi yang lengkap terkait inovasi. Maka dari itu, inovasi perlu di sampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada. Bisa melalui media elektronik,

media cetak, maupun komunikasi yang di sampaikan secara interpersonal antar masyarakat.

2. Kepercayaan

Dalam tahapan ini, individu tertarik pada inovasi serta turut aktif dalam mencari informasi secara *detail* mengenai inovasi. Tahap kedua ini akan terjadi lebih banyak dalam tingkat pemikiran calon pengguna inovasi itu sendiri. Dalam tahapan ini juga akan muncul rasa menyenangkan atau tidak senang terhadap inovasi yang di pengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri, seperti kelebihan inovasi, tingkat keserasiannya, kompleksitasnya, dapat di coba, dan dapat di lihatnya.

3. Pengambilan keputusan

Setelah mengalami tahapan persuasi yang menimbulkan rasa senang atau tidak senangnya terhadap inovasi, calon pengadopsi inovasi ini akan melakukan pengambilan keputusan inovasi. Pada tahap ini juga individu akan mengambil konsep inovasi dan menimbang keuntungan ataupun kerugian dari menggunakan inovasi tersebut sehingga dapat memutuskan apakah inovasi tersebut akan di tindak lanjuti atau tidak. Jika inovasi tersebut tidak di tindak lanjuti (ditolak), maka ada 2 macam kemungkinan, yakni :

- a. Adanya penolakan secara aktif, maksudnya penolakan inovasi di lakukan setelah melakukan proses pertimbangan untuk dapat mencoba menerima inovasi yang baru.

b. Penolakan secara pasif, maksudnya penolakan inovasi dilakukan tanpa adanya pertimbangan sebelumnya.

4. Penerapan (implementasi)

Pada tahapan ini pengadopsi inovasi sudah mulai mengadopsi inovasi tersebut. pengguna dari inovasi ini akan menentukan kegunaan dari inovasi dan dapat mencari informasi secara lebih lanjut. Pada tahapan ini pengadopsi inovasi akan mengambil keputusan untuk mengadopsi secara terus menerus hingga menjadi sebuah rutinitas.

5. Konfirmasi

Setelah inovasi tersebut diterapkan atau diimplementasikan maka pengadopsi akan berusaha menguatkan hasil keputusan inovasinya tersebut. tidak menutup kemungkinan juga apabila pengadopsi akan merubah keputusan awal. Pada awalnya menolak inovasi namun pada tahapan ini pengadopsi akan menerima inovasinya, ataupun sebaliknya.

Hambatan dalam inovasi juga dijelaskan oleh Geoff dan David dalam (Maulana, 2018) yang terbagi ke dalam 6 hambatan, yakni :

1. Keengganan untuk menutup program atau organisasi yang telah gagal
2. Tingginya ketergantungan inovasi terhadap salah satu pihak yang dipercaya sebagai sumber inovasi
3. Teknologi yang tersedia tidak sesuai dengan budaya organisasinya
4. Tidak ada imbalan ataupun insentif untuk berinovasi atau mengadopsi sebuah inovasi

5. Rendahnya kemampuan
6. Perencanaan dan juga penganggaran jangka pendek.

2. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat yakni proses perubahan struktur yang harus ada di masyarakat, di lakukan oleh masyarakat, dan hasilnya juga bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Proses dari perubahan tersebut akan berlangsung secara alamiah dengan asumsi bahwa setiap anggota masyarakat berperan sebagai pelaku sosial yang juga ikut dalam proses perubahan tersebut. dalam sebuah pemberdayaan sangat di perlukan adanya keterlibatan masyarakat yang secara aktif (Mulyono, 2008). Dalam sebuah konteks pemberdayaan, masyarakat harus di berdayakan untuk dapat merumuskan sendiri dengan melalui proses pembangunan konsesnsus di antara berbagai individu dan juga kelompok sosial yang memiliki kepentingan dan juga menanggung resiko secara langsung (*stakeholders*) akibat dari adanya proses atau intervensi dari pembangunan, baik itu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, ataupun lingkungan fisik yang pada umumnya berisikan arah, tujuan, cara dan juga prioritas pembangunan yang akan di lakukan (Mulyono, 2008).

Pembangunan yang bisa di lakukan dalam tingkatan desa yakni dengan cara memberdayakan masyarakat serta mengembangkan perekonomian masyarakat desa. Pembangunan ini bisa juga akan sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara memunculkan potensi ekonomi yang berbasis masyarakat dengan begitu akan membangun serta membangkitkan pasrtisipasi dari masyarakat desa itu sendiri (Atmojo dkk, 2017).

Pemberdayaan yang akan di lakukan sangat memerlukan langkah-langkah rill dalam menanganinya. Langkah-langkah yang di ambil dalam mewujudkan tujuan dapat melalui (Mulyono, 2008) ;

1. Pembentukan iklim yang dapat memungkinkan masyarakat tersebut dapat berkembang. Ada 2 hal yang mendasar dalam membentuk iklim bagi masyarakat yaitu dengan :

a. Menyadarkan masyarakat dan juga memberikan dorongan ataupun motivasi untuk berkembang. Proses menyadarkan masyarakat tersebut di lakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk mengenal wilayahnya sendiri dengan cara *survey* dan juga analisis. Proses ini di sebut juga dengan *participatory survey* dan *participatory analysis*.

b. Memotivasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk menggambarkan dan merencanakan suatu wilayah, yang di sebut dengan *participatory design and planning*. Pendekatan yang di lakukan pada masyarakat tersebut adalah pendekatan secara psikologis yang akan memberikan rasa ke berpihakan pada masyarakat.

2. Memperkuat potensi yang ada di masyarakat.

Memperkuat (*empowerment*) potensi masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengorganisasikan masyarakat kepada kelompok-kelompok atau komunitas pembangunan, yang selanjutnya di kembangkan dengan cara memberikan masukan-masukan atau *input* serta membuka berbagai peluang sehingga masyarakat semakin berdaya.

3. Proses Perlindungan (pendampingan) terhadap masyarakat.

Secara aplikatif (*empowerment*) bahwa kelompok masyarakat bawah dan menengah dapat dilakukan dengan melalui 2 hal, yakni :

a. Penguatan akses.

Pada pemberdayaan kelompok masyarakat dilakukan dengan cara menciptakan akses dari kelompok informal kepada kelompok formal, kelompok yang di berdayakan pada kelompok pemberdaya. Akses ini sangat membutuhkan *sharing* dan juga partisipasi antar *stakeholder* dalam proses pemberdayaannya.

b. Penguatan secara teknis.

Dalam kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar adanya peningkatan kapasitas dari kelompok yang di berdayakan. Dengan adanya keterlibatan secara aktif dari setiap *stakeholder* maka akan mewujudkan bentuk *sharing* nyata seperti program, pendanaan, dan juga kebijaksanaan (*policy*).

Menurut Huraerah dalam (Murbeng dkk, 2016) di gambarkan dalam tingkatannya keberdayaan masyarakat terbagi menjadi 5 tingkatan, yakni :

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar.
2. Penguasaan dan juga akses terhadap berbagai sistem serta sumber yang di perlukan.
3. Di milikinya kesadaran secara penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan juga kelemahan diri dan lingkungannya.

4. Kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai jenis kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
5. Kemampuan dalam mengendalikan diri dan juga lingkungan. Dalam tingkatan yang kelima ini pemberdayaan masyarakat di lihat dari keikutsertaannya dalam mengevaluasi serta mengendalikan berbagai program dan juga kebijakan institusi atau pemerintah.

Sedangkan, menurut Randi R Wrihatniko dan Nugroho Dwodjowinto dalam (Murbeng dkk, 2016), menjelaskan bahwa sebuah proses pemberdayaan masyarakat itu memiliki dua tahapan, yakni :

1. Tahapan penyadaran

Tahapan ini terget dan juga sasarannya yaitu masyarakat miskin yang di berikan pemahaman bahwa mereka memiliki hak. Tahap ini akan mengajak masyarakat miskin untuk menjadi sadar bahwa mereka memiliki kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Dalam tahap ini juga masyarakat miskin di beri penjelasan bahwa proses pemberdayaan itu harus berasal dari diri mereka sendiri. Tahapan ini akan mengupayakan masyarakat miskin agar mendapatkan informasi yang cukup serta aktual dan juga akurat. Tahapan ini juga di sertai dengan adanya pendampingan pada masyarakat miskin itu sendiri.

2. Tahapan pengkapasitasan

Tahapan ini bertujuan untuk emampukan masyarakat miskin hingga mereka dapat memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang ada.

Tahapan ini juga dapat memberikan pelatihan-pelatihan, lokarya dan juga kegiatan sejenis yang dapat meningkatkan *life skill* dari masyarakat miskin itu sendiri. Pada tahapan ini juga akan di bukakan akses untuk sumberdaya yang berada di luar komunitasnya yang di percaya dapat menjembatani harapan dan juga eksistensinya sendiri.

Menurut Pranarka dan Vidhyandika dalam (Murbeng dkk, 2016) berpendapat bahwa proses pemberdayaan itu mengandung dua kecenderungan, yakni :

1. Kecenderungan primer

Proses pemberdayaan menekankan pada proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan, dan juga kemampuan pada masyarakat agar individu bisa lebih berdaya.

2. Kecenderungan sekunder

Proses pemberdayaan menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi individu agar memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan yang menjadi pilihan hidupnya dengan melalui proses dialog.

Menurut Adisasmita yang dikutip oleh (Chaerunnisa, 2014) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat diartikan juga sebagai partisipasi masyarakat, karena sama-sama memiliki peran serta dalam melakukan kegiatan penyusunan perencanaan, dan implementasi program atau proyek pembangunan yang merupakan aktualisasi dan juga ketersediaan serta kemauan masyarakat

untuk berkorban juga berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan. Wahyudi Kumorotomo (dalam Chaerunnisa, 2014) mengatakan bahwa partisipasi juga merupakan berbagai corak tindakan massa maupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara Pemerintah dengan warganya. Secara umum corak partisipasi warga Negara dapat di bedakan menjadi 4 macam, yakni :

1. Partisipasi dalam pemilihan
2. Partisipasi kelompok
3. Kontak antara warga Negara dengan Pemerintah
4. Partisipasi antar warga Negara langsung.

Menurut Dahama dan Bhatnagar dalam (Sururi, 2015) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dari pemberdayaan itu memiliki 12 prinsip dalam praktiknya, yakni :

1. Minat dan kebutuhan

Maksudnya pemberdayaan tersebut akan efektif jika selalu mengacu pada minat serta kebutuhan masyarakatnya.

2. Organisasi masyarakat bawah

Pemberdayaan akan dikatakan efektif apabila mampu melibatkan organisasi dari masyarakat bawah, contohnya seperti keluarga atau kekerabatan.

3. Keragaman budaya

Pemberdayaan tersebut harus memperhatikan juga keragaman budaya yang ada di masyarakat, serta pemberdayaan yang akan dilakukan tersebut harus disesuaikan dengan budaya lokal masyarakat yang beragam tersebut.

4. Perubahan budaya

Setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan adanya perubahan budaya, maka dari itu kegiatan pemberdayaan tersebut harus dilaksanakan dengan bijak serta hati-hati. Agar perubahan budaya yang akan terjadi di masyarakat tersebut tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat.

5. Kerjasama dan partisipasi

Pemberdayaan tersebut akan efektif apabila mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang sebelumnya.

6. Demokrasi dan penerapan ilmu

Pemberdayaan harus dapat memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk bisa menawar dalam setiap ilmu alterfanif yang ingin diterapkannya. Maksudnya demokrasi disini adalah bukan sekedar tawar menawar tentang ilmu alternatif saja, melainkan juga dalam hal penggunaan metode pemberdayaan serta proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan masyarakat juga sebagai sasarannya.

7. Belajar sambil bekerja

Maksudnya, kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat belajar sambil bekerja juga. Seperti, belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang telah dikerjakan. Artinya, pemberdayaan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau menyampaikan konsep-konsep teoritis saja. Tetapi harus dapat memberikan juga kesempatan pada masyarakat sasarnya untuk mencoba atau memperoleh pengalaman dengan melalui kegiatan yang secara nyata.

8. Penggunaan metode yang sesuai

Maksudnya, pemberdayaan harus dilakukan melalui penerapan metode yang selalu disesuaikan dengan kondisi lingkungannya seperti, lingkungan fisiknya, kemampuan ekonominya, dan juga nilai sosial budaya sasarnya.

9. Kepemimpinan

Penyuluh tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan atau kepuasannya sendiri. Tetapi penyuluh harus mampu untuk dapat mengembangkan kepemimpinan. Maksudnya, sebaiknya penyuluh harus mampu menumbuhkan pemimpin-pemimpin lokal atau memanfaatkan pemimpin lokal yang telah ada untuk dapat membantu kegiatan pemberdayaan.

10. Spesialis yang terlatih

Dalam hal ini, penyuluh harus benar-benar orang yang telah mendapatkan latihan khusus tentang segala hal yang sesuai dengan

fungsinya sebagai penyuluh. Penyuluh-penyuluh yang telah disiapkan untuk melakukan beragam kegiatan meskipun hal tersebut berkaitan dengan hal pertanian.

11. Segenap keluarga

Maksudnya, penyuluh harus bisa memperhatikan keluarganya sebagai salah satu dari unit sosial. Maka dari itu akan terkandung pengertian-pengertian sebagai berikut :

- a) Pemberdayaan tersebut harus bisa mempengaruhi segenap anggota dari keluarga
- b) Setiap anggota keluarga harus memiliki peran atau pengaruh dalam setiap pengambilan keputusannya
- c) Pemberdayaan harus mampu mengembangkan pemahaman secara bersama
- d) Pemberdayaan akan mengajarkan pengelolaan keuangan keluarga
- e) Pemberdayaan akan mendorong keseimbangan antara kebutuhan keluarga serta kebutuhan usaha (perekonomian)
- f) Pemberdayaan tersebut harus bisa mendidik anggota keluarganya yang masih muda
- g) Pemberdayaan harus bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan keluarganya, baik itu terkait masalah sosial, masalah ekonomi, maupun masalah budaya.
- h) Pemberdayaan harus bisa mengembangkan kualitas pelayanan.

12. Kepuasan

Maksudnya, pemberdayaan harus mampu untuk mewujudkan tercapainya kepuasan. Karena kepuasan tersebut akan menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program pemberdayaan selanjutnya.

Pemberdayaan pada dasarnya memiliki tujuan yakni meningkatkan daya ataupun kekuatan yang diminili oleh masyarakat, sehingga mereka akan mampu mengatasi permasalahan yang akan dihadapinya. Sedangkan menurut Sumodiningrat yang dikutip oleh (Hairi, 2012) dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat itu memiliki 3 tujuan utama, yakni :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat ditingkat bawah dan menurunkan jumlah penduduk yang terdapat dibawah garis kemiskinan
2. Mengembangkan kapasitas masyarakat untuk dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi yang produktif bagi masyarakat di pedesaan
3. Mengembangkan kemampuan masyarakat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, baik aparat maupun warga.

Selain itu menurut Sumodiningrat yang dikutip oleh (Firmansyah, 2012) juga menjelaskan bahwa, upaya pemberdayaan masyarakat itu harus dilihat dari 3 sisi utama, yakni :

1. Upaya untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat tersebut berkembang
2. Potensi tersebut harus dapat diperkuat oleh masyarakat

3. Dalam mencapai pemberdayaan juga harus dapat melindungi masyarakat.

Kajian-kajian konseptual tentang pemberdayaan menyajikan banyak hal indikator keberdayaan. Empat hal yang menyangkut derajat keberdayaan menurut Soeharto yang dikutip oleh (Firmansyah, 2012), yakni :

1. Tingkat kesadaran serta keinginan untuk berubah
2. Tingkat kemampuan untuk meningkatkan kapasitas agar bisa memperoleh akses
3. Tingkat kemampuan dalam menghadapi hambatan
4. Tingkat kemampuan dalam kerjasama serta solidaritas

Sedangkan menurut Friedman yang dikutip oleh (Firmansyah, 2012) menyatakan adanya lima basis yang berkaitan dengan keberdayaan, yakni :

1. Pengembangan yang berbasis masyarakat
2. Keberlanjutan
3. Partisipasi masyarakat
4. Pengembangan modal sosial masyarakat
5. Penghapusan ketimpangan gender.

3. Teori Bumdes

Badan Usaha Milik Desa (BumDes) yakni suatu program pemerintahan di tingkat desa yang harus di berdayakan dalam rangka memberdayakan sosial ekonomi masyarakat yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa dari masyarakat. Menurut Solekhan yang di kutip oleh (Chintary dkk, 2016)

bahwa dalam memperhatikan besarnya peranan Bumdes ini dapat memberikan alternative pada beberapa program pendampingan maupun hibah, maka dari itu perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi :

1. Pengelolaan BumDes harus secara terbuka dan dapat di ketahui oleh masyarakat.
2. Pengelolaan BumDes harus dapat di pertanggung jawabkan pada masyarakat desa dengan cara mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku.
3. Masyarakat desa harus terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan, dan;
4. Pengelolaan BumDes harus memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Bumdes juga merupakan salah satu lembaga ekonomi di tingkat desa yang bertujuan untuk mengelola potensi desa juga mensejahterakan masyarakat desa yang di kelola oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat desa. Pembentukan BumDes ini di lakukan berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan juga pemerintah desa melalui musyawarah desa. Untuk mendorong pembangunan di tingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan pada Pemerintah Des untuk mengelola daerahnya secara mandiri, yakni salah satunya dengan melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa (Budiyono, 2015).

Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang di jalanka desa sebagai sarana untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Peranan BumDesa juga sebagai instrumen penguatan otonomi desa dan juga

sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat desa. Bumdes sebagai instrumen otonomi desa yang maksudnya adalah untuk mendorong Pemerintah Desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan serta kewenangannya desa itu sendiri (Budiyono, 2015).

Sedangkan sebagai instrumen dari kesejahteraan masyarakat yakni harus dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BumDesnya karena hal tersebut akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran di tingkat desa. Pengelolaan BumDes juga dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat desa secara langsung di harapkan mampu mendorong juga perekonomian dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan masyarakat yang di mulai sejak awal pendirian sampai dengan pengelolaan lembaga tersebut. permodalan BumDes juga memiliki komposisi dari Pemerintah Desa sebanyak 51% dan 49% dari masyarakat seperti yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BumDes) (Budiyono, 2015).

Perbedaan BumDes dengan lembaga ekonomi komersial dapat di bandingkan dari tujuh ciri utama sebagai berikut (Ridlwan, 2014) :

1. BumDes adalah milik desa dan di kelola secara bersama sama masyarakat desa.
2. Modal usahanya bersumber dari desa 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyertaan modal saham atau andil

3. Operasionalisasinya menggunakan sistem falsafah bisnis yang berakar dari bisnis budaya lokal
4. Bidang usaha yang di jalankan oleh BumDes berdasarkan pada potensi dan hasil informasi dari pasar
5. Keuntungan yang di peroleh BumDes di tujukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan juga masyarakat melalui kebijakan desa
6. BumDes juga di fasilitasi oleh Pemerintah, PemProv, PemKab, dan juga PemDes
7. Pelaksanaan operasionalisasinya di kontrol secara bersama-sama, yakni oleh BPD, PemDes, dan juga anggota.

BUMDes memiliki peran yang sangat penting bagi desa, hal tersebut juga sudah ditentukan dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan juga UU no 6 tahun 2014 bahwasannya jika dibandingkan dari kedua UU tersebut, UU no 6 tahun 2014 ini bisa dikatakan lebih elaboratif karena UU no 32 tahun 2004 hanya mengatur satu pasal saja yakni Pasal 213 tentang ketentuan BUMDes, yakni :

- 1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa
- 2) Badan usaha milik desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- 3) Badan usaha milik desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun UU no 6 tahun 2014 yang mengatur ketentuan BUMDes lebih perinci lagi. UU Desa ini mengatur tentang BUMDes pada Bab X kedalam tiga pasal, yakni :

- a. Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; ayat (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 88 ayat (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa ayat (2) Pendirian BUM Desa (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
Pasal 89 hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk :
 - 1) Pengembangan usaha
 - 2) Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Pasal 90, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan :
 - 1) Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
 - 2) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan

- 3) Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa sangat penting untuk dijelaskan secara terperinci agar dapat dipahami serta dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota-anggota (penyerta modal), BPD, Pemerintah Kabupaten, dan juga oleh masyarakat. Prinsip pengelolaan BUM Desa terbagi menjadi 6 prinsip menurut (Ridlwan, 2014) :

- a) Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan usahanya;
- b) Partisipatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa;
- c) Emansipatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUM desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;
- d) Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
- e) Akuntabel, Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; dan
- f) Sustainable, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.

G. Definisi Konseptual

4. Teori Inovasi

Inovasi adalah upaya yang dilakukan sekelompok orang dalam mewujudkan sebuah konsep yang baru. Konsep baru tersebut dapat berupa ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang akan ataupun telah dilakukan. Inovasi tersebut biasanya digunakan untuk sebuah program ataupun kegiatan. Inovasi juga biasanya dilakukan guna mencapai sebuah peningkatan dalam sebuah program ataupun kegiatan.

4. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan menggunakan semaksimal mungkin sumber daya yang ada untuk dapat memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga digunakan guna meningkatkan keterampilan masyarakat agar bisa diterapkan saat menjalani program ataupun kegiatan yang ada di masyarakat.

12. Teori BumDes

BumDes adalah lembaga yang dikelola dalam tingkatan Desa yang memiliki peranan penting bagi masyarakat. BumDes akan menjadi fasilitas bagi masyarakat saat akan melakukan transaksi baik itu penjualan ataupun pembelian barang maupun jasa. Dengan adanya BumDes juga akan menjadi salah satu faktor peningkatan pendapatan atau perekonomian masyarakat desa.

H. Definisi Operasional

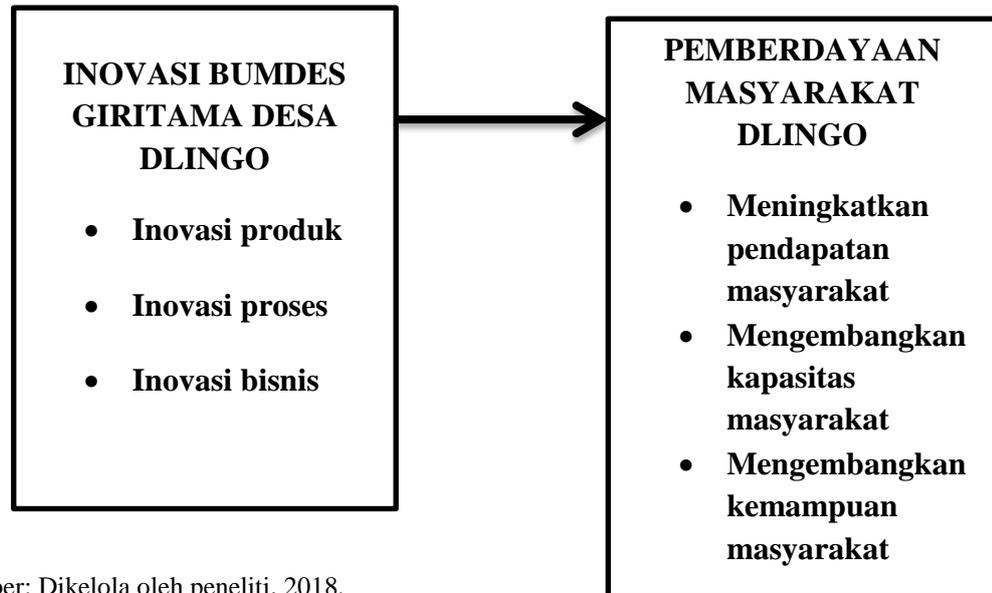
Penelitian ini akan disajikan dalam beberapa bentuk indikator tentang inovasi Pemerintah Desa berdasarkan teori di atas, hal ini untuk melihat sejauh mana inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Dlingo dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui Desa Mart tahun 2017. Adapun konsep operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 1.4
Definisi operasional

Variabel	Indikator	Parameter
1. Inovasi	a. Inovasi Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Macam-macam produk 2. Kegunaan produk.
	b. Inovasi Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak yang mengolah produk. 2. Cara mengolah produk. 3. Jangka waktu yang di butuhkan 4. Pihak yang mengawasi.
	c. Inovasi Bisnis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses <i>marketing</i>. 2. Bentuk perjanjiannya. 3. Strategi <i>marketing</i> yang di gunakan.
2. Pemberdayaan Masyarakat	a. Meningkatkan pendapatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka usaha kecil 2. Mengasah kemampuan dalam mengolah produk 3. Kerjasama dalam menjual produk
	b. Mengembangkan kapasitas masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti pelatihan untuk masyarakat 2. Mengikuti sosialisasi
	c. Mengembangkan kemampuan masyarakat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, baik aparat maupun warga.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi secara terbuka 1. Komunikasi yang baik antar sesama masyarakat 2. Tanggung jawab. 3. Kerjasama dengan kelompok/organisasi lain

I. Kerangka Berfikir

Gambar 1.1
Kerangka Berfikir



Sumber: Dikelola oleh peneliti, 2018.

J. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik yang di gunakan penelitian secara spesifik. Pada dasarnya penelitian guna menunjukkan kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang menjadi kajian penelitian untuk mencapai tujuan tersebut. untuk mendekati permasalahan yang diteliti dan menemukan jawabannya maka di perlukan suatu metode penelitian yang memadai (Salim, 2002).

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah metode dan proses untuk mempelajari kasus beserta hasil yang di peroleh dari proses belajar (Salim, 2002). Studi kasus juga adalah pendekatan yang harus mendeskripsikan secara rinci kondisi subjek dan latar penelitian dalam banyak aspek, maksudnya agar dapat dinilai dimana letak kekhasannya (Suwartono, 2014).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Jenis penelitian ini mampu memberikan uraian mengenai pengetahuan, sikap dan perilaku Pemerintah Desa Dlingo dalam mewujudkan inovasi pemberdayaan masyarakat melalui Desa Mart. Alasan memilih jenis penelitian ini karena peneliti ingin mendeskripsikan tentang bagaimanakah inovasi yang di lakukan oleh Pemerintah Desa Dlingo dalam mewujudkan inovasi pemberdayaan masyarakatnya melalui Desa Mart tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang di ambil oleh peneliti adalah Badan Usaha Milik Desa Giritama Desa Dlingo (BumDes Giritama Desa Dlingo). Hal ini karena Desa Mart yang menjadi tujuan utama peneliti dalam melakukan penelitiannya berlokasi di BumDes Giritama Desa Dlingo serta narasumber yang di butuhkan berpusat di BumDes Giritama Desa Dlingo.

3. Unit Analisa Data

Adapun unit analisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Unit analisa data

No	Instansi	Jumlah	Nara Sumber
1	Pemerintahan Desa	2	Kepala Desa Periode 2012-2017, Sekertaris Desa
2	Badan Usaha Milik Desa	1	Manajer/pengelola Unit Usaha BumDes Giritama
Jumlah		3	

4. Jenis Data

a) Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan peneliti dari sumber utamanya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Dlingo termasuk BumDes Giritama. Sumber data yang di kumpulkan peneliti berdasarkan hasil dari observasi secara sederhana dan juga wawancara secara langsung. Observasi sederhana merupakan melakukan pengamatan secara tidak kontrol (gambaran sederhana dari pengamatan dan juga pendengaran peneliti). Peneliti akan mengamati gejala-gejala serta kejadian-kejadian secara apa adanya dalam kondisi yang alami tanpa melakukan suatu kontrol ilmiah. Sedangkan wawancara secara langsung merupakan proses wawancara yang di lakukan secara langsung pada nara sumber terkait tanpa melewati media ataupun pihak ketiga (Emzir, 2014).

Tabel 1.6
Data primer

No	Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Proses inovasi Pemerintah Desa Dlingo dalam memberdayakan masyarakat melalui Desa Mart (BumDes Giritama)	<ul style="list-style-type: none"> • Manajer/pengelola Unit Usaha BumDes Giritama • Kepala Desa Dlingo Periode 2012-2017 • Sekertaris Desa Dlingo 	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi sederhana • Wawancara
2	Strategi yang digunakan Desa Mart dalam proses marketing	<ul style="list-style-type: none"> • Manajer/pengelola Unit Usaha BumDes Giritama • Kepala Desa Dlingo Periode 2012-2017 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan studi kepustakaan merupakan sumber data sekunder (Emzir, 2014)

Tabel 1.7
Data sekunder

No	Data Sekunder	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam memasarkan hasil bumi serta hasil olahan makanan dan juga kesenian di Desa Mart.	BumDes Giritama	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi
2	Jumlah anggota pengelola Desa Mart	BumDes Giritama	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Observasi

Terjun langsung ke lapangan untuk meneliti secara langsung kegiatan yang biasa dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Dlingo agar mendapatkan informasi secara visual. Observasi atau pengamatan dapat pula di definisikan sebagai perhatian yang terfokus pada kejadian, gejala, ataupun sesuatu (Emzir, 2014).

b) Wawancara

Teknik penelitian ini akan dilakukan baik pada saat berobservasi atau pada waktu lain. Wawancara ini dilakukan secara langsung dan terbuka dengan informannya adalah pemerintah Desa Dlingo

khususnya Mantan Kepala Desa Dlingo periode 2012-2017 yakni pendiri dari Desa Mart itu sendiri dengan tujuan agar mendapatkan data yang lebih empiris lagi. Selain itu, akan melakukan wawancara semi terstruktur karena untuk mengantisipasi agar pada saat melakukan wawancara tidak bingung atas hal-hal yang ingin ditanyakannya kepada informan (Emzir, 2014)..

c) Dokumentasi

Mendapatkan sumber data dokumentasi sebagai data pelengkap dalam penelitiannya juga untuk menggambarkan suasana dan keadaan Pemerintah Desa Dlingo dan juga BumDes Giritama saat melangsungkan Desa Martnya tersebut. Pengumpulan data ini dilakukan secara langsung pada saat berkunjung langsung ke lokasi BumDes Giritama Desa Dlingo. Dokumentasi disini adalah pengambilan gambar lokasi penelitian saat melakukan proses penelitiannya sebagai penunjang data serta mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen Pemerintah Desa Dlingo terkait struktur keanggotaan, kegiatan di Desa Mart (Emzir, 2014).

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis deskriptif, yang di maksudkan data disini adalah data yang di peroleh dari hasil penelitian yang kemudian di analisis oleh peneliti secara deskriptif (menggambarkan). Dengan tujuan agar pembaca mendapatkan gambaran dalam

bentuk penulisan peneliti tentang fakta/peristiwa/keadaan yang terjadi di lapangan saat peneliti sudah meneliti subjek penelitiannya.

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010) menjelaskan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif itu di lakukan dengan cara interaktif dan juga berlangsung secara terus menerus dan datanya tersebut tuntas juga jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini di mulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan/verifikasi. Model interaktif dalam menganalisis data, yakni :

1. Mengumpulkan data

Mengumpulkan data ialah tata cara yang sistematis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Cara mengumpulkan data selalu berhubungan dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Pada tahap ini data kumpulkan melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Mereduksi data

Mereduksi data adalah proses memilih dan memusatkan perhatian kepada penyajian yang lebih sederhana lagi. Data yang bentukannya masih kasar yang berasal dari catatan selama di lokasi penelitian. Mereduksi data ini juga di lakukan secara terus menerus selama kegiatan penelitian itu berlangsung. Maksud dari reduksi data adalah memilih atau merangkum hal yang penting agar lebih fokus terhadap fokus penelitiannya, yakni penelitian tentang inovasi pemerintah Desa Dlingo dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui Desa Mart. Data yang telah di pilih

atau di rangkum tersebut akan memberikan gambaran penting terhadap hasil penelitiannya.

3. Menyajikan data

Data di sajikan setelah di sederhanakan menggunakan bahasa yang mudah di mengerti. Data mana saja yang telah di pilih dan di sajikan dalam bentuk data yang lebih sederhana lagi. Dalam tahap ini menyajikan teks yang bersifat narasi/naratif.

4. Penarikan kesimpulan/ Verifikasi

Dalam menarik sebuah simpulan dari data yang telah di dapatkan serta semua bukti data selama penelitiannya berlangsung akan di kumpulkan. Karena bukti tersebut merupakan bukti yang valid dan bisa di percaya dan agar hasil penelitian ini di pandangan konsisten.